



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440 / 118 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :
440/4/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Se Kabupaten Kendal dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/1590 /Dinkes tanggal 8 Maret 2021 Perihal Pengajuan Perubahan Keenam Atas Surat Keputusan Bupati Kendal Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/291/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang

5 r

Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2 x

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200));

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 64 Seri D. No.16);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 75);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 76);
21. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/291/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

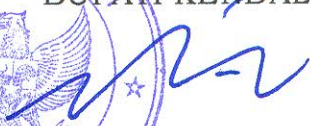
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/291/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/4/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

24

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 23 Maret 2021


BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Para Bendahara Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

SUSUNAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL YANG MENERAPKAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NAMA	UPTD PUSKESMAS
1	Misri	Puskesmas Plantungan
2	Tri Handayani, A.Md.Keb.	Puskesmas Pageruyung
3	Wagimin	Puskesmas Sukorejo 1
4	Rumini, A.Md. Keb.	Puskesmas Sukorejo 2
5	Ani Sulistyowati, S.Gz.	Puskesmas Patean
6	Rubini	Puskesmas Singorojo 1
7	Tri Ruswati, Amd.Keb	Puskesmas Singorojo 2
8	Endah Tri Sayekti, A.Md. Keb	Puskesmas Limbangan
9	Eny Dwi Widayati	Puskesmas Boja 1
10	Suwarti	Puskesmas Boja 2
11	Achmad Machsun, A.Md.Kep.	Puskesmas Kaliwungu
12	Haptani Susilaningsih, A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Riska Widyana, A.Md.Keb	Puskesmas Brangsong 1
14	Putri Indah Nurani,S.Kep.Ns.	Puskesmas Brangsong 2
15	Linda Mustiyowati, A.Md.Kep	Puskesmas Pegandon
16	Wuri Darmayani, A.Md.AK	Puskesmas Ngampel
17	Siti Mustofiyah, A.Md.Kep.	Puskesmas Gemuh 1
18	Eni Wahyuni, A.Md.Keb.	Puskesmas Gemuh 2
19	Sudarmi, S.Tr.Keb.	Puskesmas Ringinarum
20	Ponco Retnowati	Puskesmas Rowosari 1
21	Arinta Dwi Kurniawati,A.Md.Kep.	Puskesmas Rowosari 2
22	Sholaekah, S.S.T.Keb	Puskesmas Weleri 1
23	Hevy Yulia, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri 2
24	Hasto Hesti Susiati,A.Md.Kep	Puskesmas Kangkung 1
25	Puryanti,S.Tr.Keb.	Puskesmas Kangkung 2
26	Slamet	Puskesmas Cepiring
27	Yunita Mierdhiyani, A.Md.AK.	Puskesmas Patebon 1
28	Emy Kusriana, A.Md. Keb.	Puskesmas Patebon 2
29	Kusriatun, A.Md.	Puskesmas Kendal 1
30	Durrotul Aini, A. Md. Far	Puskesmas Kendal 2

BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	NAMA	UPTD PUSKESMAS
1	Neti Aprilia Sri Untari	Puskesmas Plantungan
2	Netty Suryaningsih	Puskesmas Pageruyung
3	Siti Indrayani, Amd.Keb	Puskesmas Sukorejo 1
4	Wasitatun, S.S.T. Keb	Puskesmas Sukorejo 2
5	Dhian Fitriani Suprapta, A.Md	Puskesmas Patean
6	A'idina Lailatul M, A.md.Keb	Puskesmas Singorojo 1
7	Arie Budiyantri,AMG	Puskesmas Singorojo 2
8	Siti Darwati,A.Md.Keb.	Puskesmas Limbangan
9	Subagiyo, S.Kep. Ns	Puskesmas Boja 1
10	Arief Widayanti,Amd.Kep	Puskesmas Boja 2
11	Wenny Indrastuti,A.Md.Keb	Puskesmas Kaliwungu
12	Mujaenah, A.Md.Kep	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Nuraini Handayani, SST.Keb	Puskesmas Brangsong 1
14	Ken Ratna Dewi Purwana, Amd.Rad	Puskesmas Brangsong 2
15	Yuliana Rahmawati,A.Md.Keb	Puskesmas Pegandon
16	Dian Kurniawati Hapsari,A.Md.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Rika Rahadianingtyas,A.Md.KG	Puskesmas Gemuh 1
18	Kristianah,Amd.Keb.	Puskesmas Gemuh 2
19	Sri Wahyuni,AMd.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Tri Endah Kurniadewi	Puskesmas Rowosari 1
21	Barokah	Puskesmas Rowosari 2
22	Siti Masadah,A.Md.Keb	Puskesmas Weleri 1
23	Elvi Febriyanti, SKM	Puskesmas Weleri 2
24	drg.Happy Septianto Suprpto	Puskesmas Kangkung 1
25	Nur Safa'ah	Puskesmas Kangkung 2
26	Septi Ofiyantari,S.Kep.Ners.	Puskesmas Cepiring
27	Supatmi,SST.Keb.	Puskesmas Patebon 1
28	Jikronah Sri Lestari, A.Md.Keb	Puskesmas Patebon 2
29	Ifa Ida Astuti,A.Md.Kep	Puskesmas Kendal 1
30	Supiyah, A.Md. Keb	Puskesmas Kendal 2

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO